

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha merupakan upaya perbaikan kesejahteraan keluarga, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang harus dihadapi ditengah-tengah masyarakatnya. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan di dukung oleh keunggulan lokal dan Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, Perbaikan mutu dan nilai-nilai produk.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, Pengembangan lembaga modal ventura, Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.¹

Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha adalah kerajinan genteng Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Usaha

¹www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx

kerajinan genteng di desa Manyaran Kecamatan Banyakan ini dimulai sejak jaman nenek moyang, pembuatan genteng telah ada walaupun masih secara manual, dan dari sinilah warga mempelajari dan mengetahui cara membuat genteng, dimulai dari bahan baku sampai dengan pembakaran. Bahan utama genteng adalah tanah terutama tanah kaloin dan tanah liat. Pada awalnya bahan baku genteng diambil dari daerah lokal dikarenakan tanah tersebut cocok digunakan untuk membuat genteng. Selain itu, harga tanah tersebut masih sangat murah dan juga masih memiliki kualitas yang baik.

Lambat laun seiring dengan berjalannya waktu kerajinan genteng Desa Manyaran Kecamatan Banyakan ini semakin dikenal luas hingga memiliki tempat tersendiri dihati masyarakat bahkan hasil genteng dari Desa ini telah dikenal oleh masyarakat luar Kabupaten Kediri dengan kualitas yang baik, hingga usaha kerajinan genteng tersebut menjadi ladang usaha dan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Manyaran.

Dari proses pengembangan kerajinan genteng ini lah dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan dapat menopang ekonomi di Desa Manyaran serta dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Sebelum berkembangnya kerajinan genteng seperti saat ini, masyarakat Desa Manyaran mayoritas menggantungkan kehidupan penghasilan dan pemenuhan ekonomi mereka dari sektor pertanian, hal tersebut membuat pendapatan menjadi tidak menentu. Gambaran mengenai industri genteng dapat dilihat dari banyaknya kerajinan genteng yang ada di Dusun Kradenan Desa Manyaran. Upaya pengembangan tersebut

membuktikan bahwasanya industri genteng telah membawa dampak yang baik terhadap kemajuan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada pada Desa tersebut.

Desa Manyaran Kecamatan Banyakan sudah familiar ditelinga masyarakat bahwa desa Manyaran merupakan salah satu desa penghasil genteng dengan kualitas terbaik di Jawa Timur khususnya Kabupaten Kediri. Bahkan nama genteng Kradenan sendiri berasal dari nama daerah penghasil genteng yakni Dusun Kradenan. Industri genteng di Desa ini menggunakan cara tradisional dan konvensional, yaitu menggunakan tenaga kerja atau buruh dan ditambah dengan mesin press, mesing pengaduk tanah dan mesin pemotong sebagai pendukungnya.

Dusun Kradenan merupakan salah satu Dusun yang terletak di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Dusun Kradenan inilah yang menjadi pusat dari kerajinan genteng Desa Manyaran, banyak usaha kerajinan usaha genteng yang tumbuh dan berkembang di Desa ini menjadikan Dusun Kradenan menjadi ikon dari Desa Manyaran dalam bidang kerajinan genteng.

Saat ini produksi genteng Dusun Kradenan merupakan industri rumahan yang masih cukup menjanjikan, banyak terlihat disepanjang jalan, di halaman depan rumah warga berjejer genteng hasil industri rumahan genteng warga. Untuk proses pemasarannya cakupannya sudah lumayan luas, khususnya di Jawa Timur sendiri, maka tak heran jika sebagian masyarakat Desa Manyaran

menggantungkan hidupnya pada kerajinan genteng, entah sebagai pekerja atau perantara antara penjual dan pembeli (pihak ketiga).

Pekerja kerajinan genteng ini dalam produksinya perlu adanya partisipasi pekerja kurang lebih 10-15 orang dalam satu tahapan pembuatan genteng, pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki namun juga dilakukan oleh ibu-ibu. Sehingga ibu-ibu juga turut andil dan mengambil bagian dalam produksi genteng ini. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kerajinan genteng ini mampu menekan angka pengangguran di wilayah ini, kontribusi secara ekonomi juga dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Manyaran.

Kerajinan genteng Dusun Kradenan di Desa Manyaran ini merupakan salah satu potensi lojal yang dapat menguatkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, masyarakat menjadi tertolong dari segi lapangan pekerjaannya, penghasilan dari kerajinan genteng yang didapatkan selama bekerja di kerajinan genteng tersebut. Hal tersebut tentunya didukung oleh hasil konsistensi masyarakat dalam keseriusannya menjaga kualitas, dan jalinan komunikasi yang baik sehingga genteng Dusun Kradenan tetap mampu dilestarikan dan dikembangkan.

Dalam proses pemberdayaanya sebagai suatu upaya dan sebuah proses, maka pemerintah selalu berupaya mensinergikan hal positif pada masyarakat khususnya pengrajin genteng, Agar kerajinan genteng di Desa ini semakin berkembang dan mampu atau dapat memberdayakan banyak sumber manusianya, sinergitas tersebut dilakukan dengan penambahan bantuan alat atau mesin agar memudahkan dalam prosesnya dan diharapkan mampu

menghasilkan dengan kualitas yang lebih baik lagi, sehingga usaha dapat berkembang.

Untuk manusianya pemerintah Desa melaksanakan program pelatihan agar menjadi bekal dan mengasah keterampilan agar lebih optimal. Selain dari hal tersebut pemerintah bekerjasama dengan pihak luar (pihak ketiga) dalam permodalannya, agar usaha kerajinan yang ditekuni masyarakat desa Manyaran dapat terus konsisten dan terus berlanjut, dengan mempertahankan kualitas dan kuantitasnya.

Pemberdayaan dalam hal ini menjadi wajib hukumnya, dikarenakan segala hal yang ada di muka bumi ini, menjadi tanggung jawab yang harus dijaga oleh seluruh umat manusia selaku makhluk Allah SAW yang paling sempurna dengan dibekali akal pikiran serta nafsu, yang darinya pula dapat menghasilkan suatu kebaikan yang menjuru pada kebaikan dan kemaslahata bagi semua makhluk, juga sebaliknya dapat mendatangkan kerusakan, untuk itulah manusia dituntut untuk mengembangkan perilaku yang mulia terhadap lingkungan yang juga memiliki hak sama sebagai makhluk Allah SWT.

Pemetaan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dilakukan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) terkait potensi yang bertujuan dari pendataan Podes ini adalah untuk memetakan informasi mengenai kualitas infrastruktur dan keseluruhan potensi ekonomi, sosial, sumber daya manusia dan alam yang dimiliki oleh Desa sehingga nantinya dapat mengangkat potensi yang ada di desa.

Urgensi pemberdayaan masyarakat menjadi suatu hal yang mutlak untuk dijadikan perhatian, Sebagaimana Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki ahlak sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di muka bumi ini, Seperti firman Allah dalam surat Ar Ra'd:11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.²

Berdasarkan penjelasan Ayat diatas, Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum) Artinya Dia tidak mencabut dari mereka nikmat-Nya (sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri) dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka. (Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum) yakni menimpakan azab (maka tak ada yang dapat menolaknya) dari siksaan-siksaan tersebut dan pula dari hal-hal lainnya yang telah dipastikan-Nya (dan sekali-kali tak ada bagi mereka) bagi orang-orang yang telah dikehendaki

²Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Al Qur'an Dan Terjemah Rasmul Utsmani, (Jakarta: Gedung Menara Da'wah), 52

keburukan oleh Allah (selain Dia) selain Allah sendiri (seorang penolong pun) yang dapat mencegah datangnya azab Allah terhadap mereka.³

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kerajinan genteng yang dicontohkan oleh masyarakat Desa Manyaran memang menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat dan Desanya. Berangkat dari aset lokal, kualitas yang baik, kerjasama yang maksimal dan upaya dari pemerintah desa dalam keseriusannya mengandeng masyarakatnya. Hingga saat ini mampu membuka lapangan kerja bagi warga desanya dan mampu menjadikan genteng Kradenan dikenal oleh masyarakat luas. Hal tersebut tidak serta merta mengalami pengembangan secara tiba-tiba dan praktis, melainkan melalui proses dan perjalanan yang penuh terjal, demi mewujudkan masyarakat yang berdikdaya dan mandiri sehingga mampu mencapai kesejahteraan bersama dan pengembangan industri genteng yang semakin melalang buana.

Maka, upaya proses pemberdayaan masyarakat desa utamanya usaha kerajinan genteng sangatlah perlu diterapkan untuk menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrowi. Sehingga kedepannya mampu menciptakan generasi masyarakat yang *hablum minal bi'ah* (Mencintai Alam) dan *hablum minannas* (mencintai sesama makhluk) dan taat pada ketentuan kewajiban dan sunnah dari tuhanNya (*Hablum minAllah*). Salah satu bentuk proses pemberdayaan dan pengembangan usaha kerajinan genteng.

³*Ibid*,..72

Secara umum tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat ini adalah sebagai pengamalan dari Allah SWT yang mana manusia sebagai kholifah di dunia ini, yang menyeeru pada kebaikan dan menghindari pada keburukan. Maka perlu kiranya pemberdayaan ini ditegakkan dengan berdasarkan pada syariat islam yang baik, karena jika dalam praktiknya pemberdayaan masyarakat tidak dibarengi dengan proses yang baik (sesuai syariat islam) maka yang terjadi adalah kemadharatan (kemungkaran) dan secara tidak langsung kemadharatan tersebut akan berlangsung terus menerus pada generasi selanjutnya dan mendatangkan ke sia-sia an.

Berdasarkan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat diatas, peneliti melihat adanya keserasian dengan prinsip prinsip syariat Islam, yang mana dalam penelitian ini disebut dengan maqāshid syariat. Salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam adalah menjaga harta karena setiap manusia telah ditakdirkan rezeqinya oleh Allah SWT, Namun demikian manusia tidak hanya diam berpangku tangan saja melainkan juga dibarengi dengan ikhtiar yang didalamnya ada usaha serta do'a.

Maqāshid syariat merupakan sebuah tujuan yang tertentu untuk pemenuhan aspek syariat islam yang kemudian direalisasikan dan di implementasikan dalam kegiatan keseharian manusia. Hal tersebut juga diterapkan di dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Maqāshid syariat harus menjadi sebuah pondasi, sebagai latar belakang dilakukannya pemberdayaan tersebut, dengan kata lain dalam pemberdayaan masyarakat sudah dapat dikatakan sesuai dengan aspek syariat apabila telah memenuhi 5

Aspek atau kriteria dari maqashid syariah. Yaitu: *Hifdz' māl* (menjaga harta), *Hifdz' dīn* (menjaga agama), *Hifdz' nasl* (menjaga keturunan), *hifdz' 'aql* (menjaga akal), dan *Hifdz' nafs* (menjaga jiwa).⁴ Kelima inilah yang mengajak peneliti untuk menelaah lebih jauh penerapan atau pengimplementasian masyarakat desa dalam membangun pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kerajinan genteng, khususnya dalam sektor perekonomian pada masyarakat Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Dalam buku pemberdayaan masyarakat Totok Mardikanto menyebutkan bahwasanya dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, selain terdapat tujuan aspek kesejahteraan maka terdapat pula aspek politik ekonomi Islam politik. Politik ekonomi islam merupakan sebuah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya, yang kemudian direalisasikan dan di implementasikan dalam kegiatan keseharian manusia. Dalam pembuatan kebijakan hukum diatas menyangkut dua hal, yaitu (1) mengadaptasi ketentuan hukum yang telah tersedia, (2) mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan. Dalam politik ekonomi islam terdapat keselarasan dengan maqashid syariah, sehingga hal tersebut dapat memberikan stimulus yang baik antara tujuan politik ekonomi islam dan māqashid syariah.⁵

⁴ Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 146

⁵Ija Suntana, politik ekonomi islam (siyasah maliyyah), (Bandung: CV. Pustaka setia, 2010), 13

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Kerajinan Genteng, Prespektif Maqāshid Syariah dan Politik Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Jawa Timur)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan genteng pada Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan genteng prespektif maqāshid syariah di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan genteng prespektif politik ekonomi islam di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui industri genteng pada Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui industri genteng prespektif maqāshid syariah di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

3. mengetahui proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui industri genteng prespektif politik ekonomi islam di Desa Kecamatan Banyakan Manyaran Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Operasional

Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi usaha kerajinan genteng dalam melakukan pengembangan usaha yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor industri genteng di desa Manyaran kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor-sektor industri genteng.
3. Sebagai media untuk menguji kemampuan menulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh.

E. Definisi Oprasional

1. Pemberdayaan adalah Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat

sisipan –m- dan akhiran –an manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.⁶

2. Pemberdayaan Masyarakat Ketiga pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang mempunya tujuan yang jelas dan harua dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat enggan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Maqāshid Syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga dan jamaah.⁷
5. Politik Ekonomi Islam

Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan

⁶ Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), 1

⁷Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia), 2019, 129

nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Pembuatan kebijakan hukum di atas menyangkut dua hal, yaitu (1) mengadaptasi ketentuan hukum yang telah tersedia, (2) mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan.⁸

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini dibuat untuk mengetahui perbedaan sekaligus keaslian dari penelitian yang akan dilakukan, maka sangatlah perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian yang sudah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Wildan Arif. H (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Magister Ekonomi Syariah, meneliti tentang “*Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Memenuhi Aspek Maqashid Syariah Melalui Pendekatan Asset Based Community Development Studi Kasus Desa Isata Pujon Kidul Malang*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini banyak membahas tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Malang. Tujuan dalam penelitian ini adalah tujuan, menganalisis pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :
 - a. Keterlibatan masyarakat meskipun kapasitasnya dapat memberikan dan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi hal ini terkait dengan asumsi bahwa

⁸Ija Suntana, politik ekonomi Islam (siyasah maliyyah), (Bandung: CV. Pustaka setia, 2010), 13

keterlibatan masyarakat sangat berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lokasi penelitian sebenarnya masyarakat mempunyai serta memiliki antusias dan respon yang tinggi dalam proses pemberdayaan.

- b. Pengawasan dan sinergitas dari pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sangat berarti bagi masyarakat dalam proses percepatan pemberdayaan.
- c. Keterkaitannya proses pemberdayaan masyarakat desa wisata pujon kidul dalam pemenuhannya terhadap aspek maqashid syariah, menjadikan upaya pemberdayaan melalui metode *Asset based community development* menjadikan dalam proses pemberdayaan tidak jauh dari yang di syariatkan oleh islam.

2. Penelitian Asma'ul Fauziyah Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Program Magister Pendidikan Luar Sekolah, meneliti tentang "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Home Industry Kerupuk Ikan Di Desa Srowo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*" Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan tehnik koleksi data, reduksi data, dan display data. Tehnik-tehnik tersebut digunakan untuk mencari data dalam penelitian pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan *home industry* kerupuk ikan. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *home industry* kerupuk ikan sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat Srowo yang mengalami peningkatan. Masyarakat yang awalnya memperoleh bahan baku dari masyarakat lokal dan memproduksi kerupuk ikan dalam skala kecil dengan menggunakan alat-alat tradisional, selain itu jumlah konsumen juga masih sedikit.

Saat ini masyarakat mampu memproduksi kerupuk ikan dalam jumlah yang besar dengan menggunakan peralatan yang lebih modern. Dalam pengadaan bahan baku, masyarakat mendapatkannya dari luar wilayah Srowo karena masyarakat lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku, selain itu jumlah peminat kerupuk dari Desa Srowo juga meningkat dan mencapai daerah luar pulau.

- b. Faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan harga yang terjangkau. Adapun faktor penghambatnya adalah cuaca yang tidak menentu, kualitas tepung yang berubah-ubah dan kualitas ikan yang tidak menentu.

1. Penelitian Mohammad Sofiandi (2015) Mahasiswa UIN sunan kalijaga, Program Magister Studi Pembangunan, meneliti tentang “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Di Desa Gilangharjo Pandak Kabupaten Bantul (Studi Kasus lembaga Community Development Yayasan Suara Bhakti)*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini banyak membahas tentang pemberdayaan masyarakat khususnya bidang pertanian. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan berbasis lingkungan dapat dijadikan dengan baik karena penerapan CTC (Community Training Center) dan IFS (*Integrated Farming System*).
 - b. Antusiasme keikutsertaan dalam proses ini, menjadikan upaya atau program pemberdayaan tersebut memberikan stimulus yang tepat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pemberdayaan

a. Definisi dan konsep

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata ”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.⁹ Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.¹⁰ Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.¹¹

⁹ Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), 1

¹⁰ Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Pt Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, 57

¹¹ *Ibid.*, 57

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kukasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹²

Pemberdayaan dengan berbagai bentuk modelnya diterapkan untuk memberdayakan orang, masyarakat dan organisasi termasuk pemberdayaan organisasi pemerintah. Salah satu yang dapat membantu mengaplikasi konsep pemberdayaan dalam bahasa teknis adalah konsep pembangunan yang digerak kan masyarakat. Berkenaan dengan kepentinga tersebut, kita memerlukan beberapa konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat yang meliputi 1). Kedekatan hubungan antara konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat dan tujuan-tujuan penanggulangan kemiskinan secara lokal maupun nasional. 2).

Definisi model-model pemberdayaan masyarakat yang paling sesuai dengan kondisi lokal di seluruh indonesia dengan merujuk pada pembangunan yang digerakkan masyarakat sebagai konsep besarnya. Konsep pembangunan yang diterapkan masyarakat telah diterapkan

¹² Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Pt Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, 60

sedemikian luas terutama dalam program-program yang dibiayai negara.¹³

Konsep pembangunan yang digerak kan masyarakat memberikan konsekuensi hubungan yang bersifat *zero-sum game* antara masyarakat dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Konsep pembangunan yang digerak kan masyarakat di definisikan sebagai kegiatan pembangunan yang diputuskan sendiri oleh warga komunitas dengan menggunakan sebanyak mungkin sumberdaya setempat.¹⁴ Selain itu disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan konflik lokal. *Pertama*, persoalan kesesuaian konsep pembangunan yang digerak kan masyarakat dengan nilai-nilai lokal. dan *Kedua*, persoalan manfaat konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat untuk mewujudkan tujuan upaya penanggulangan kemiskinan.

Pertama, kesesuaian konsep pembangunan yang digerak kan Masyarakat dengan nilai-nilai lokal. Kita perlu memahami persoalan bahwa pendekatan pembangunan yang digerakkan Masyarakat bukan satu-satunya konsep pemberdayaan masyarakat karena terdapat banyak variasi dalam penerapan program pembangunan yang belum tentu sesuai dengan kriteria konsep pembangunan Masyarakat. Oleh karena itu diperlukan modifikasi dan cara pandang baru untuk memberdayakan Masyarakat.

¹³ Randy R, Wrihatmolo Dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Management Pemberdayaan*, (Jakarta:Pt. Elex Media Komputindo, 2007), 79-80

¹⁴*Ibid*, 81

Kedua, Manfaat konsep pembangunan yang digerak kan masyarakat untuk mewujudkan tujuan upaya penanggulangan kemiskinan. Kita juga perlu menyadari persoalan tentang tujuan penerapan konsep pembangunan yang digerak kan masyarakat sendiri kedalam perikehidupan masyarakat lokal.¹⁵ Dipihak lain pendekatan pemberdayaan, dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu:

- 1) Pendekatan partisipatif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan, yang mengacu:
 - a) Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan orang luar atau penguasa.
 - b) Pilihan kegiatan, metode maupun teknik pemberdayaan, maupun tehnologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyarakat.
 - c) Ukuran keberhasilan permberdayaan, bukanlah ukurang yang “dibawa” oleh fasilitator atau berasal dari “luar”, tetapi berdasarkan ukuran ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.
- 2) Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa apapun kegiatan yang akan dilakukan, darimanapun sumberdaya dan tehnologi

¹⁵ Randy R, Wrihatmolo Dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Management Pemberdayaan, (Jakarta:Pt. Elex Media Komputindo, 2007), 83

yang akan digunakan, dan siapapun yang akan dilibatkan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya.

- 3) Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu secara mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan.¹⁶

Ketiga, pendekatan tersebut diatas, secara lebih sederhana pernah dirumuskan oleh Kartasasmita (1995) kedalam tiga strategi pokok yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat.
- c) Memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat.¹⁷

Terkait dengan ketiga pendekatan tersebut, Kartasasmita menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek

¹⁶Adi,Rukminto, Intervensi Komunitas:Pengembangan Masyarakat Sebagai UpayaPemberdayaan(Jakarta:Rajawali Press,2008), 71

¹⁷*Ibid.*, 72

dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: *Pertama*, upaya itu harus terarah, ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai.

Kedua, pemberdayaan harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu, karena itu telah disinggung di awal maka pendekatan kelompok adalah yang paling efektif.¹⁸

b. Macam- Macam Pemberdayaan

Dalam pelaksanaanya, terdapat suatu sinergi yang dibangun didalam pemberdayaan guna mengoptimalkan upaya peningkatan kapasitas tersebut. Masyarakat, lembaga atau organisasi menjadi fasilitator dan pelaku pemberdayaan. Pemberdayaan itu sendiri sangat bervariasi berdasarkan tujuan pembangunan. Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, macam-macam pemberdayaan ini dapat dipadukan untuk saling melengkapi kebutuhan pemberdayaan. Terdapat

¹⁸ Adi, Rukminto, Intervensi Komunitas: *Pengembangan Masyarakat.....*, 73

dua macam pokok pemberdayaan sebagai kunci pendukung keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat.

1) Pemberdayaan lingkungan

Lingkungan menjadi erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dimana potensi lingkungan menjadi sumberdaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Karena dari lingkunganlah, masyarakat memperoleh unsur-unsur yang diperlukannya untuk produksi dan konsumsi. Sehingga pemberdayaan lingkungan dapat menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan dalam mensejahterakan masyarakat.

Tugas utama dari pemberdayaan lingkungan ini adalah membangun kesadaran serta pemahaman masyarakat akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup memenuhi kewajiban serta tanggung jawab untuk tercapainya lingkungan yang produktif serta sehat.

2) Pemberdayaan Sosial Dan Budaya

Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan satu upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan dan penegakan nilai-nilai, gagasan dan norma-norma serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu

memberi pengawasan serta kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.¹⁹

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰ Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu pengertian strategi sering rancu dengan metode, tehnik atau taktik. Tentang hal ini, secara konseptual, strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan seperti:

- 1) Strategi sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan kandasannya pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan.
- 2) Strategi sebagai kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi untuk memenangkan persaingan dan tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan, sebagai pedoman dan pengendali pelaksana kegiatan.

¹⁹Tesis Oleh Wildan Arif, Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 Judul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Memenuhi Aspek Maqashid Syariah Melalui Pendekatan Asset Based Community Development(Studi Pada Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang Jawa Timur)",44

²⁰Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, (Bandung:ALFABET, 2013),167

- 3) Strategi sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi/perusahaan, terutama manager puncak.
- 4) Strategi sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 5) Strategi sebagai pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentang waktu yang tidak pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk “menutup” kelemahan-kelemahan guna mengantisipasi atau meminimumkan ancaman-ancamannya.²¹

Dari pembahasan strategi diatas dapat disimpulkan bahwa apapun pengertian yang akan diberikan, strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya suatu tujuan. Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga

²¹ Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif.....*, 167-168

arah, yaitu: *Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. *Ketiga*, Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat. Dalam hubungan ini Isnawan (1996) menetapkan lima strategi pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

- a) Pengembangan sumberdaya manusia.
- b) Pengembangan kelembagaan kelompok.
- c) Pemupukan modal masyarakat (swasta).
- d) Pengembangan usaha produktif.
- e) Penyediaan informasi tepat guna.²²

Dalam telaah Suharto 1997, Terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, ia mengemukakan adanya 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

- a) Motivasi, dalam hubungan ini keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu setiap rumah tangga perlu didorong

²² Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*,....., 168-170

untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengembangkan dan mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat pula dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

- b) Peningkatan kesadaran dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan diwilayahnya.²³
- c) Manajemen diri, setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melakukan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen

²³ Srihandini, Sukesi, Hartati Kanty Astuty, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Surabaya:Scopindo,2019), 76-78

kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok tersebut kemudian diberikan wewenang untuk mengolah sendiri sistem tersebut.

- d) Mobilisasi sumberdaya, untuk mobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi serta substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama.²⁴
- e) Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan-peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dana kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin, lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, kelima aspek

²⁴ Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*....., 170-171

pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5P strategi pemberdayaan yaitu: *Pertama*, Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. *Kedua*, Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindarkan terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.²⁵

Ketiga, Penguatan, melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka. *Keempat*, Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.²⁶

²⁵Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*,170-171

²⁶Srihandini, Sukesi, Hartati Kanty Astuty, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Surabaya:Scopindo,2019), 79

d. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ditujukan agar sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya memiliki daya saing, dan mandiri. Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat minat dan potensi yang berbeda.
2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi yang ada. Hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda.
3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama, dan lain sebagainya.²⁷

e. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

²⁷Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabet, 2013), 58-60

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah melakukan pembangunan melalui dua arah Yaitu: *Pertama*, dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut dengan desa pembangunan. *Kedua*, perencanaan teknokratik, yaitu sebuah perencanaan yang melibatkan kekuatan desa seperti kecamatan, kabupaten atau kota provinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan pedesaan yang dapat juga disebut membangun desa.²⁸

f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu untuk merinci ragam materi yang akan disampaikan oleh setiap fasilitatornya. Di lain pihak, perlu untuk selalu diingat bahwa penerima manfaat pemberdayaan adalah manusia yang akan diperbaiki mutu kehidupannya. Dalam hal tersebut juga perlu disiapkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan keluarganya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang harus dihadapi ditengah-tengah masyarakatnya.²⁹

Terkait dengan ragam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

²⁸ Soleh A, Strategi Pembangunan Potensi Desa. Jurnal Sungkai. Vol 5 .No 1. 32-35.

²⁹Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, , 222

1) Bina Manusia

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, difokuskan pada dua hal yakni:

i. Peningkatan Kemampuan Masyarakat

Dalam konsep pendidikan, yang dimaksud kemampuan setiap individu mencakup ranah, Pengetahuan (*Kognitif*), Sikap (*Afektif*) dan Keterampilan (*Psikomotorik*). Tentang ketiga ranah tersebut, kritik yang sering disampaikan kepada dunia pendidikan kita adalah, terlalu terpusat pada “*hard skill*” dan kurang memperhatikan “*soft skill*” atau terpusat pada ranah kognitif, sedikit ranah psikomotorik, dan kurang memperhatikan ranah afektif.

Terkait dengan masalah tersebut, maka peningkatan kemampuan masyarakat yang akan diupayakan melalui pemberdayaan adalah diutamakan kepada: sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian. Maksud dari sikap kewirausahaan adalah sikap inovatif, mengacu kepada (masyarakat) pasar, serta optimasi sumberdaya lokal. Dengan perkataan lain, kemampuan kewirausahaan diarahkan untuk menggali keunggulan komparatif yang dimiliki dan

atau tersedia dilokalitasnya untuk diubah menjadi keunggulan bersaing.³⁰

Sedangkan kemandirian bukan diartikan sebagai berdikari (memenuhi kebutuhannya sendiri), melainkan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya. Artinya dalam kemandirian tidak menolak bantuan dari “pihak lain”, tetapi kemandirian dalam artian berani menolak bantuan yang akan merugikan dan atau akan menciptakan ketergantungan.

ii. Peningkatan Posisi Tawar Masyarakat

Terkait dengan peningkatan posisi tawar, pengorganisasian masyarakat, akan memainkan peran strategis. Tidak saja menyusun kekuatan bersama, tetapi juga dalam membangun jejaring antara pemangku kepentingan yang terdiri dari: birokrasi, akademisi, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan pelaku/pengelola media, utamanya dalam kegiatan politisi dan akademisi.³¹

2) Bina usaha

Tidak dapat dipungkiri, bahwa lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentang (UMKM) ini, disamping merupakan

³⁰ Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*,....., 223

³¹Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*,....., 224

bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja. Oleh sebab itu bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat mencakup banyak hal seperti:

- i. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai-nilai produk.
- ii. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
- iii. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan di dukung oleh keunggulan lokal.
- iv. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.
- v. Peningkatan aksesibilitas terhadap, modal, pasar, dan informasi.³²

3) Bina lingkungan

Harus kita akui bahwa pembangunan yang dilakukan Indonesia sejak awal 1970-an telah meembawa dampak negatif sebagai perusak hutan terbesa, pencemaran lingkungan dari limbah industri/pertanian/rumah tangga, serta perusak lahan dari kegiatan pertambangan. Menghadapi kegiatan tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat terhadap kesadaran lingkungan sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

³² Totok Mardikanto, Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik.....*, 224-225

Untuk itu implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan, dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.³³

e. Macam- Macam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anwar juga mengemukakan bahwa dalam konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dapat dilaksanakan menggunakan dua teknik, yaitu. Pengorganisasian masyarakat (*citizen participation*), dan partisipasi masyarakat (*Community organization*). Pada keseluruhan teknik pemberdayaan tersebut yang muaranya adalah masyarakat selaku objek sekaligus subjek pemberdayaanya:

1) Pengorganisasian Masyarakat (*Community Organization*).

Secara definisi, pengorganisasian masyarakat ini mengandung makna intrinsik yang mendalam, rakyat atau masyarakat disini tidak hanya sekedar mengacu pada istilah *community* (komunitas) yang lebih luas, namun juga mengacu pada istilah *society* (masyarakat) lebih umum.³⁴ Menurut Ross Murray, pengertian pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi dan menentukan prioritas dan kebutuhan kebutuhan pada tataran masyarakat tersebut, serta mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan

³³ *Ibid*,...226

³⁴ Agus Afandi, Muhammad Hadi Sucipto, Dkk, *Modul Participatory Action Research*, (Sidoarjo:CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2013. 93-94

skala prioritas berdasarkan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong.³⁵

Pada dasarnya, prinsip mengorganisir masyarakat (*community organizers*) adalah sebagai berikut:

- a) Membangun etos kerja dan komitmen *organizer*. Etos dan komitmen seorang *community organizer* merupakan prinsip utama agar mampu bertahan menghadapi banyak tantangan dan berhasil membawa sebuah perubahan bersama masyarakat.
- b) Keberpihakan dan pembebasan terhadap kaum lemah.
- c) Berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat.
- d) Belajar bersama masyarakat, merencanakan bersama dan membangun dengan apa yang masyarakat punya.
- e) Kemandirian, merupakan prinsip yang dipegang baik dalam sikap, politik, budaya, maupun dalam memenuhi kebutuhan dari sumber-sumber yang ada.
- f) Berkelanjutan, setiap kegiatan pengorganisasian di orientasikan sebagai suatu yang terus menerus dilakukan.
- g) Keterbukaan, setiap anggota komunitas dirancang untuk mengetahui masalah-masalah yang akan dilakukan.

³⁵*Ibid*, 92

h) Partisipasi, setiap anggota komunitas memiliki peluang yang sama terhadap informasi maupun terhadap proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh komunitas.³⁶

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Lebih lanjut pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.³⁷

Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar.

Lebih lanjut Abe mengemukakan, bahwa melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa beberapa dampak penting, yaitu: a). Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat. b). Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan

³⁶*Ibid.*, 64

³⁷ Tesis Oleh Wildan Arif, Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 36

perencanaan karena semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik. c). Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Tingkat keberhasilan setiap program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan partisipatif yang mana pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat partisipatif tinggi, akan memiliki kesetaraan di antara anggotanya, dan memiliki kompetensi tinggi untuk berdialog. adapun beberapa metode pendekatan pemberdayaan yang bersifat partisipatif yaitu *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dan *Asset Based Community Development (ABCD)*.

a) *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

Secara definisi *Participatory Rural Appraisal (PRA)* menurut chamber, merupakan sebuah metode pendekatan pemberdayaan yang dilakukan melibatkan masyarakat lokal untuk meningkatkan, serta menganalisis kondisi sosial dengan melakukan perencanaan dan tindakan dalam proses pemberdayaan. Metode ini dapat memperkuat rasa bangga, memiliki, serta orisinalitas yang tinggi sehingga dapat memperkuat suatu komitmen, antusiasme, dan kerja yang baik antar praktisi.³⁸

³⁸ Tesis Oleh Wildan Arif, Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 36

Selain itu, PRA dilakukan tidak hanya sekedar terdiri dari riset melainkan terdapat perencanaan serta memonitor dan mengevaluasi, dimana masyarakat lokal akan mendapat pembinaan serta pengawasan langsung dari pihak terkait. Pada metode PRA ini proses program yang dilakukan dapat menyesuaikan keadaan dan kemauan masing-masing masyarakat, supaya nantinya masyarakat dapat memiliki antusiasme yang tinggi di dalam melakukan ataupun membentuk suatu kebijakan.

Adapun prinsip utama dari metode ini adalah diharapkan agar masyarakat dapat saling belajar, berbagi pengalaman, serta adanya keterlibatan aktif terhadap seluruh anggota kelompok.³⁹ Tahapan dalam metode pendekatan *Participatory Rural Appraisal*. Di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, metode PRA digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada di Masyarakat.

Di dalam praktiknya terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan diantaranya: *Pertama*, Pengenalan terdapat masalah/kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah. Tahap ini bertujuan

³⁹*Ibid*, 37

untuk menggali informasi tentang kondisi masyarakat dan lingkungan suatu daerah secara umum.

Peneliti dapat mendatangi langsung dan melihat potensi serta kebutuhan pada masyarakat. *Kedua*, Kemudian perumusan masalah dan strategi penerapan prioritas. Sehingga dapat difokuskan potensi yang terdapat di masyarakat. *Ketiga*, Identifikasi solusi serta pengembangan gagasan merupakan tahap yang selanjutnya. Hal tersebut dilakukan guna mencari suatu strategi solusi permasalahan melalui mufakat yang diadakan oleh masyarakat. *Keempat*, Pemilihan alternatif yang disesuaikan dengan kemampuan Masyarakat dan sumberdaya yang ada.

Kelima, Penerapan gagasan agar dapat di implementasikan dengan mudah. *Keenam*, Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat. *Ketujuh*, Pemantauan dan pengarahan kegiatan masyarakat dan dilanjutkan dengan evaluasi akhir dari strategi yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Dari tahapan diatas, dapat disimpulkan bahwa metode ini menggunakan analisis, perencanaan, mentoring dan evaluasi dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi pada suatu desa. Tahapan pada

participatory rural appraisal ini dapat terlaksana hanya jika seluruh masyarakat dan perangkat desa mampu bersinergi dan berperan aktif dalam pelaksanaannya.⁴⁰

b) *Asset Based Community Development (ABCD)*.

Pendekatan *asset based community development (ABCD)* ini pada awalnya dikembangkan oleh seorang pakar John L. Mcknight dan John P. Kretzman dari Institute For Policy Research di Universitas Northwestern. Pada sebuah buku yang mereka tuliskan, Mereka menjabarkan bahwa dalam penekanan pemberdayaan yang mereka gunakan adalah optimalisasi adanya potensi aset yang dimiliki suatu daerah.

Definisi *Asset Based Community Development (ABCD)*. Secara definisi *Asset Based Community Development (ABCD)* adalah pendekatan pemberdayaan yang dilakukan sebagai upaya penyadaran masyarakat mengenai keberadaan dan potensi positif yang dimiliki oleh masyarakat. Kekuatan dan potensi tersebut harus diidentifikasi, diketahui dan dipahami, yang kemudian dapat digerakkan oleh

⁴⁰ Tesis Oleh Wildan Arif, Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 38-39

masyarakat sendiri sebagai upaya kesejahteraan dan keberdayaan mereka.⁴¹

Dalam *Asset Based Community Development* (ABCD) hal yang lebih diutamakan adalah peranan dari masyarakat internalnya sendiri, bukan semata-mata mengendalikannya mobilisasi dan campur tangan dari pihak eksternal. Adanya wujud partisipasi masyarakat secara penuh menunjukkan rasa kecintaan dan kepedulian kepada aset milik mereka sendiri, sehingga hasil yang didapatkan akan sangat berarti jika proses pembangunannya dilakukan secara bersama-sama.

Tantangan dalam pendekatan ini adalah pemilihan lingkungan yang memungkinkan untuk dijadikan ladang berinvestasi atas aset, yakni dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dari sisi eksternal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lokal, dengan demikian sangatlah tepat jika penggunaan metode pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) ini digunakan dengan memilih dengan berdasarkan pada pilihan yang *responsive* pada aspirasi dan gagasan dari masyarakat lokal karena di dalamnya mengedepankan musyawarah bersama untuk

⁴¹Tesis Oleh Wildan Arif, Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 40

mencapai hasil kesepakatan yang mufakat. Metode ini juga menonjolkan potensi aset yang dimiliki dari pada memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Tahapan Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Di dalam suatu pemberdayaan ekonomi masyarakat, metode *Asset Based Community Development* (ABCD) digunakan untuk mengathui kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat kemudian memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama.⁴²

Terdapat banyak metode yang berbeda dalam proses *Asset Based Community Development* (ABCD) ini yang kemudian dirangkum dalam tahapan metode yang dirasa cocok untuk pengembangan aset dan potensi desa khususnya dibidang pertanian.⁴³

Pertama, Mengumpulkan cerita dengan cara melakukan diskusi formal maupun informal guna menggali ide dan informasi terkait pengalaman dalam mencapai tujuan yang sudah tercapai di masa lalu, dengan tujuan untuk memunculkan *pote* yang mungkin masih terpendam, juga untuk memunculkan kepercayaan dan percaya diri bagi masyarakat untuk membangun dan dalam pemberdayaan desanya. *Kedua*,

⁴² Tesis Oleh Wildan Arif, Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 43-44

⁴³ Nathan Kasnof, Nasrum Dkk, Sejahtera Dari Desa Refleksi Pemberdayaan Berbasis Potensi Pertanian,(Mqlqng:Avverroes Press, 2017), 25.

Pengorganisasian kelompok inti. Pada tahapan ini bisa dibentuk beberapa tim kelompok berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, untuk memudahkan proses pengorganisasian yang baik.

Ketiga, Pemetaan aset. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan aset, terkait wilayah dan wujud aset yang seperti apa yang hendak dikembangkan seperti apa yang hendak dikembangkan sebagai fokus kedepan.⁴⁴ Setidaknya terdapat 5 aset yang dapat dikembangkan menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) diantaranya adalah: Pertama, Aset individu. Yakni berupa sumberdaya manusia yang menjadi titik pusat penggerak dalam *Asset Based Community Development* (ABCD).⁴⁵

Kedua, Asosiasi adalah kelompok kecil, yang dibentuk berdasarkan klasifikasi keahlian, yang umumnya mereka bekerja secara suka rela demi kepentingan bersama. *Ketiga*, Institusi adalah lembaga/institusi Pemerintah yang bersifat profesional dan dibayar yang bertugas membantu Masyarakat menangkap sumberdaya berharga dan membangun rasa

⁴⁴ Tesis Oleh Wildan Arif, Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 46

⁴⁵ *Ibid*, 47-48

tanggung jawab sebagai bagian dari anggota Masyarakat.

Keempat, Aset fisik, seperti tanah, bangunan, sumber air dll, yang tampak dan dapat dimanfaatkan.

Kelima, Koneksi hubungan atau jaringan baik antara individu di dalam masyarakat ataupun dari pihak lain di luar kelompok masyarakat.⁴⁶

Perumusan Visi dan Misi perencanaan Pada saat perumusan visi dan misi rencana ini, diharapkan untuk dapat dihadiri oleh segenap perwakilan dari seluruh elemen sub masyarakat untuk dapat mengetahui secara langsung dan berkontribusi ide dan gagasannya dalam perumusan visi dan misi ini, sehingga pendekatan *participatory* dapat terealisasi.⁴⁷

Menggerakkan *Asset* Pada tahap ini adalah perwujudan arti visi dan misi perencanaan yang telah disepakati bersama, pada tahap ini pula asset dan juga potensi sudah teridentifikasi dan mulai dikomunikasikan.

g. Pemberdayaan Menurut Ekonomi Islam

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam

⁴⁶*Ibid*,48

⁴⁷*Ibid*, 50

pandangan islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat.⁴⁸ Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.⁴⁹

Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al- Quran tentang pemberdayaan *dhu''afa*, “*community empowerment*” (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada ininya adalah membantu klien” (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.⁵⁰

⁴⁸ Matthoriq, Dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, 427

⁴⁹ *Ibid*,..427

⁵⁰ Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu''Afa*(Jakarta: Dakwah Press) *Cet Ke-1*, 9

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya.

Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua Pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah islamiyah.⁵¹ *Kedua*, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK.

Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual *an sich*.

⁵¹Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034, 19

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.⁵²

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “pengingat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah

⁵²Ibid 19

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”(Al-Hasyr: 7).⁵³

h. Dasar Hukum Pemberdayaan

لُنْحِيِي بِهِ بِلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيِي كَثِيرًا

Artinya: “Agar dengan air itu kami menghidukan yang mati tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami citakan, berupa hewan ternak dan manusia yang banyak”. (QS. Al-Furqon: 49)⁵⁴

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Artinya: “Kemudian setan membisikan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata”Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekat pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal”. (Al-A’raf:20)⁵⁵

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali yang mempunyai akal sehat”. (QS. Al-Baqoroh: 269).⁵⁶

⁵³Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemah Rasmul Utsmani*, (Jakarta: Gedung Menara Da’wah), 546

⁵⁴*Ibid* ,..463

⁵⁵*Ibid* ,..245

⁵⁶*Ibid* ,..45

2. Maqāshid Syariah

a. Definisi Dan Konsep Maqāshid Syariah

Kata syariat berasal dari "*syara'a as syar'i*" dengan arti menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari "*asy-syir'ah*" dan "*asy-syariah*" dengan artinya tempat sumber air yang tak pernah putus dan orang yang datang kesana, tidak memerlukan adanya alat. Dan ada juga yang menulis bahwa "*Asy-Syara*" adalah jalan yang jelas.⁵⁷

Sedangkan Maqashid secara bahasa adalah jamak dari *Maqshad*, dan *maqsad* masdar mimi dari fi'il *Qashada* dapat dikatakan: *Qashada-Yaqshidu-Qashdan-Wa Maqshadan, al qashdu dan al maqshadu* artinya sama, beberapa arti *al qashdu* adalah: *Al'Itimad*: berpegang teguh, *Al Amma*: condong, mendatangi sesuatu dan menuju. Dengan mengetahui pengertian maqashid dan *Asy-Syari'ah* secara bahasa, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian yang teekandung dalam istilah, yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah SWT yang terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan penemuan manfaat umat ataunjuan dari Allah SWT.

- 1) Ibnu Al Qayyim Al Jauziyah menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan

⁵⁷Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*,128

tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan masalah bagi umat manusia.

- 2) Maqāshid syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga dan jamaah.⁵⁸
- 3) Dr. Wahbah Zuhaily menyebutkan Maqāshid Syariah adalah sejumlah makna atau nilai-nilai dan sasaran yang hendak dicapai oleh *syara'* dalam semua atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syarai'at, atau rahasia dibalik perencanaan tiap tiap hukum oleh *syar'i*.
- 4) Yusuf Al Qardhawi mendefinisikan Maqāshid *Asy Syariah* sebagaintujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, jamaah, keluarga dan umat. Atau disebut juga dengan hikmat-hikmat yang menjaditujuan ditetapkannya hukum.
- 5) Ulama Ushul Fiqh mendefinisikan maqashid ayaraiah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqāshid syariah dikalangan ulama ushul fiqih disebut juga *Asrar Al Syariah*, yaitu rahasia-rahasia yang

⁵⁸*Ibid*,..129

terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁹

Maqāshid syariah dalam arti māqashid syar'i mengandung empat aspek, keempat aspek tersebut adalah: 1) Tujuan awal dari syariah adalah kemashlahatan di dunia dan di akhirat. 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 3) Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan. 4) Tujuan syariah adalah membawa ke bawah naungan hukumnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka maqashid syariah adalah maksud dan tujuan di syariatkannya hukum Islam. Beberapa ulama mendefinisikan Maqāshid Syariah secara umum berarti kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan *dharuriyat* dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat* mereka. Kesimpulannya bahwa maqashid syariah adalah konsep untuk mengetahui himmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al Qur'an dan Hadits), yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia, yang tujuan akhirnya adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *aqidah* dan *mu'ammalah*) maupun di akhirat (dengan *aqidah* dan *ibadah*).

⁵⁹ *Ibid.*,130

Sedangkan cara untuk tercapainya kemaslahatan adalah dengan memenuhi kebutuhan *Dharuriyat* (Primer), *Hajiyyat* (Sekunder) dan *Tahsiniyyat* (Tersier).⁶⁰ Maqāshid syariah haruslah memenuhi empat macam kriteria. *Pertama*, Maqāshid syari'ah harus *tsabit* maksudnya bahwa sebuah hikmah dari persyariatan hukum bisa direkomendasikan tujuan syariat apabila dapat dipastikan keberadaannya.⁶¹

Kedua, Maqāshid syari'ah haruslah *dhahir* dalam artian bahwa para ulama' tidak mempertentangkan keberadaannya sebagai tujuan syariat. *Ketiga*, Maqāshid syari'ah haruslah *mundlobith* maksudnya bahwa suatu hikmah harus memlunyai standar yang jelas. *Keempat*, Maqāshid syari'ah haruslah *muththarid* maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi waktu, seperti keislaman dan kemampuan ataa nafkah yang menjadi persyaratan dari *kafa'ah* dalam nikah.

Dengan demikian setiap hikmah yang telah memenuhi ke empat kriteria di atas, bisa dinyatakan sebagai Maqāshid syari'ah, sedangkan hal hal yang hanya berdasarkan kemungkinan tanpa dasar maka dapat dipastikan itu bukan merupakan Maqāshid syari'ah.⁶² Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya,

⁶⁰Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*,131

⁶¹*Ibid*,.130

⁶²Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*,..... 131-132

baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Anbiya':107 dan Al-Qur'an surah Al Baqarah 201-202.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya':107).⁶³

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

وَلِعَلَّكَ هُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Dan diantara mereka ada yang berdo'a, ya tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab mereka”. (Qs Al Baqarah 201-202).⁶⁴

Berdasarkan tujuannya, Maqāshid Syari'ah terbagi 2 (dua) pertama, Maqāshid Syari'ah yaitu maqāshid yang diletakkan oleh Allah SWT dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya adalah menarik perhatian dan menolak kejahatan di dunia dan di akhirat.⁶⁵

Allah SWT menciptakan syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maqāshid-Nya untuk manusia yaitu untuk memberikan kebaikan kepada mereka yang menolak keburukan yang menimpa mereka. Segala apa yang disyariatkan tidak terlepas

⁶³Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Al Qur'an Dan Terjemah Rasmul Utsmani, (Jakarta: Gedung Menara Da'wah),331

⁶⁴Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Al Qur'an Dan Terjemah Rasmul Utsmani,.....,31

⁶⁵Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*,.....145-146

dari Maqashid syari'ah. Tujuan syariat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

Kepentingan asas *Dharuriyyat*, Yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan perbaikan agama dan kehidupan di dunia dan di akhirat karena kehidupan manusia akan rusak di dunia atau diakhirat jika kepentingan asas ini tidak ada atau tidak terpenuhi, sehingga dalam syariat dikenal dengan *Al Dharuriyat al khamsah* (lima hal yang sangat penting). Diantaranya adalah, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ke Lima hal diatas merupakan masalah yang senantiasa dijaga oleh syariat meskipun dengan jalan yang berbeda-beda, sehingga yang digulirkan oleh syariat meletakkan dua sandi dasar yaitu, mewujudkan dan melahirkan hukum (*Al Ijaad*) dan menjaga kesinambungannya (*Al Hifd*).

a) Perlindungan Terhadap Agama/Memelihara Agama

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam.⁶⁶ Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama Islam selain komponen-komponen aqidah yang merupakan pasangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim dari hadist yang diriwayatkan oleh Al-

⁶⁶Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah,.....,136

Bukhori yang diambil dari jalur Masruq dari Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

”Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal, jiwa dengan jiwa, orang yang telah menikah berzina, dan orang yang murtad dari agama islam karena meninggalkan sholat jamaah.”⁶⁷

Berdasarkan hadist diatas sudah sangat jelas sekali bahwasanya Allah melindungi orang-orang yang berada dalam Agama-Nya. Jadi orang-orang yang berada dalam agama-Nya haram baginya darahnya atau haram baginya untuk membunuhnya. Islam menjaga hak dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat”. (Qs.Al Baqarah: 256).⁶⁸

⁶⁷Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah,,136

⁶⁸Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Amzah,2009),20

b) Perlindungan Terhadap Nyawa/ Memelihara Jiwa

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariah Allah SAW sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran.⁶⁹

Allah SAW berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa':29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri,, sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa':29).⁷⁰

⁶⁹Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*,142

⁷⁰Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah Rasmul Utsmani*,.....86

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan hak-hak manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dalam segala jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Hak pertama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaan manusia adalah ciptaan Allah.

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنِعَ اللَّهُ
الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu sesungguhnya Allah maha mengetahui aa yang kamu kerjakan”. (Qs. An-Naml:88)

Adalah sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu dia menjadikan menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh) nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhnya.⁷¹

c) Perlindungan Terhadap Akal/Memelihara Akal

Akal merupakan sumber hikmah/pengetahuan, sinar hidayah, cahaya matahari dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhira. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak pemimpin di

⁷¹Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Amzah,2009),22

muka bui, an dengannya manusia menjadi sempurna, mulia da berbeda dengan mahluk lainnya. Allah SAW berfirman:”

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dan yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan”. QS: Al- Isra’:70.⁷²

Andai tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, baik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal poros pada diri manusia. Dengannya manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapatkan siksa.⁷³

Balasan di dunia dan di akhlat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan, setiap kali manusia mengoperasikan akal pikirannya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang cinta, dan ketenangan. Akal dinamakan ikatan karena bisa

⁷²Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemah Rasmul Utsmani*.....,289

⁷³Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*.....,91

mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran.⁷⁴

d) Perlindungan Terhadap Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

أَمْالٌ وَالْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. (Qs. Al- Kahf: 46).⁷⁵

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu”. (Qs. Al- Baqarah: 29)

Manusia termotivasi untuk mencari harta untuk mempertahankan eksistensinya, dan demi menambahkan kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah SAW dan masyarakat tempat dia hidup.⁷⁶ Adapun beberapa perkara yang dilarang Allah, yakni:

⁷⁴Ahmad Al Mursi Husain Jauhar,92-93

⁷⁵Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah Rasmul Utsmani*,.....285

⁷⁶Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*.....167

I. Pemborosan

Karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya. Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan”. (Qs. Al-A’raf 31).⁷⁷

II. Mencuri

Allah mengharamkan harta dari jalan mencuri. Mencuri adalah mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya.

III. Riba

Allah menjuga mengharamkan riba, Riba adalah kelebihan harta tanpa imbalan atau ganti yang disyaratkan, yang terjadi dalam sebuah transaksi atau akad dan hal tersebut hukumnya haram.⁷⁸

IV. Penipuan.

Allah juga mengharamkan penipuan. Nabi mengatakan bahwasanya, tidak halal bagi seseorang untuk menjual melainkan menjelaskan keburukannya,

⁷⁷Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemah Rasmul Utsmani*,.....,73

⁷⁸Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*.....,168

dan tidaklah halal bagi yang mengetahuinya, melainkan menjelaskannya.⁷⁹

e) Perlindungan Terhadap Keturunan Atau Memelihara Keturunan

Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina, terhadap perempuan muhsanat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syariat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina. Allah SAW berfirman dalam QS Al-Isra':32.⁸⁰

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”⁸¹

2. Kebutuhan biasa (*Al Hajiyyat*)

Merupakan keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan akhirat, tanpanya kehidupan manusia tidak akan sempurna dan mengalami kesempitan. Beberapa kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat adalah:

⁷⁹Ahmad Al Mursi Husain Jauhar,.....168-170

⁸⁰Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah Rasmul Utsmani*.....,285

⁸¹Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*.....,144

- a) Syariat membolehkan rukhsah dalam ibadah untuk memudahkan kesulitan yang terjadi dalam melaksanakan perintah.
- b) Dalam *muammalah*, syariat membolehkan jual beli yang merupakan pengecualian dari kaidah umum jual beli, seperti Salam, *ijaroh* dan *muzara'ah*.⁸²
- c) Dalam masalah *uqubah* (hukuman).
- d) Syariat membolehkan kaidah *dar'ul hudūd bi al syubuhāt* (menunda *hudūd* karena tuduhan) atau diyat atas keluarga terpidana sebagai keringanan baginya.

3. Keperluan Mewah (*Al Tahsiniyat*)

Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia mampu merasakan kenayaman hidup, seperti:

- a) Menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik, mengenakan pakaian yang bersih dan bagus ketika memasuki masjid dan bertaqarrub kepada Allah SWT.
- b) Dalam ber muammalah dilarang boros, jual beli diatas pembelian orang lain, dll.
- c) Dalam *'adat*, diajarkan cara makan dan minum yang baik.
- d) Dalam *uqubah* dilarang mutilasi dalam *qishas* dll.

⁸² Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*.....,146

5. Politik Ekonomi Islam

a. Pengertian Politik Ekonomi Islam

Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.⁸³

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan dengan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program. Pembuatan kebijakan hukum diatas menyangkut dua hal, yaitu: (1) Mengadaptasi ketentuan hukum yang telah tersedia, (2) Mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan.

Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (*at-tasharruf*). Secara teknis, Politik Ekonomi Islam lebih dikenal dengan sebutan *siyasah maliyah*. Istilah lain yang berkembang adalah *tadakhkhul ad-daulah* (intervensi negara). Istilah intervensi negara dikembangkan oleh Muhammad BaqrAsh-Shadr adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi

⁸³Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*.....,13

hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi secara lengkap.⁸⁴

b. Landasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi

1) Tauhid (*Tāuhidullah*)

Landasan tauhid adalah pengakuan secara mendasar bahwa semua sumber-sumber ekonomi berasal dari dan milik Allah, prinsip tauhid membentuk sebuah konsepsi universal bahwa sumber kehidupan bukan milik perseorangan, melainkan milik publik (*milikullah*) dan harus dapat terakses oleh semua orang.

2) Keadilan (*‘Adālah*)

Landasan keadilan adalah prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber-sumber ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati sumber-sumber ekonomi secara nyata. Sesuai firman Allah SWT:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
 ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain dia, yang maha perkasa, maha bijaksana”. (Al-Imran: 18).⁸⁵

⁸⁴Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*,....., 13-14

⁸⁵Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemah Rasmul Utsmani*.....,52

2) Keberlanjutan (*Istimrariyyah*)

Landasan keberlanjutan menghendaki bahwa pendayagunaan sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi sumbernya secara berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan didasarkan pada fakta keberadaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya, sementara konsumsi terhadapnya tidak terbatas. Oleh sebab itu, efisiensi dan adil harus merupakan landasan penentuan kebijakan pengelolaan dan distribusi sumber-sumber ekonomi yang bersangkutan.⁸⁶

c. Pilar- Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar- pilar pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi, ada Lima pilar kebijakan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1) Menghidupkan faktor manusia

Maksud menghidupkan faktor manusia adalah setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dengan orang lain. Faktor ini didasarkan pada sebuah

⁸⁶Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyyah)*....., 117

pernyataan Rasulullah SAW, bahwa rezeqi yang paling baik adalah rezeqi yang dihasilkan oleh tangan seseorang langsung.

Ada dua upaya yang harus dilakukan dalam menghidupkan faktor manusia. *Pertama*, mendorong motivasi individu. *Kedua*, memberikan pelatihan, sistem yang paling mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi dan mewujudkan keadilan dalam distribusi adalah motivasi individu.⁸⁷

Ada dua hal yang dapat menumbuhkan motivasi individu untuk meningkatkan taraf ekonomi dirinya dan orang lain. *Pertama*, Regulasi atau aturan yang bias dan tidak realistis. *Kedua*, pemusatan kekayaan dan kesempatan mengakses sumber-sumber keuangan hanya untuk segelintir orang. Bias dan tidak realistisnya kebijakan pemerintah menimbulkan kekeliruan orientasi bisnis, penyimpangan harga, hak buruh yang terzalimi, dan ketimpangan lainnya.⁸⁸

2) Pengurangan Pemusatan Kekayaan

Masalah ekonomi yang serius, kapan dan dimanapun merupakan adanya pemusatan kepemilikan atas sarana produksi di hampir setiap negara, lebih-lebih dinegara

⁸⁷Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*.....,118

⁸⁸Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*.....,18-19

Muslim. Kebijakan pengurangan pemusatan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut:

a) *Land Reform* (masalah utama)

Land reform (masalah utama) berkisar pada ukuran pemilikan tanah dan masa sewa. Sebuah konsep klasik Politik Ekonomi Islam yang pernah dijadikan kebijakan *Land reform* adalah *Ihya'al mawat* yaitu merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk dijadikan lahan produktif.

b) Pengembangan Perusahaan Kecil Dan Mikro

Pengembangan perusahaan kecil dan mikro yang efisien akan mengurangi pemusatan kekayaan. Perkembangan perusahaan mikro dapat dilakukan dengan cara penyuntikan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka.⁸⁹

d. Teori Maslahat, Keadilan, Dan Kesejahteraan

Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis maslahat adalah sebagai berikut:

1. Hukum dirumuskan untuk meujudkan dan memelihara kemashlahatan manusia serta menolak kemudaratan.
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada maslahat sehingga disaat ada mashlahat, disana terdapat syariat.

⁸⁹Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*....., 20-21

3. Kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan perseorangan.
4. Maslahat dirumuskan secara bersama oleh rakyat dan pemerintahan melalui musyawarah para ahli untuk menentukan maslahat umum dan maslahat individual.

Dilihat dari segi sumber hukum islam, maslahat terbagi dua yaitu, pertama, *Al Maslahah Al Manshushah*, maslahat yang secara jelas disebutkan langsung oleh sumber hukum islam (Al Qur'an dan Al Hadist). Kedua, *Al Maslahah Al Mustanbathah*, maslahat yang dirumuskan oleh para pihak yang kompeten dalam menentukan maslahat. Sementara itu dari segi sifatnya, para ahli hukum islam membagi maslahat kedalam dua jenis, yaitu mashlahat yang bersifat individual-subjektif (*al maslahah al khashkah*), dan maslahat yang bersifat sosial-objektif (*al maslahah al 'ammah*).⁹⁰

Dari segi tujuan, para ahli hukum Islam membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Maslahat *dharuriyat* mencakup lima hal dasar, yaitu, melindungi agama, melindungi nyawa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi harta. Maslahat *hajiyyat* mencakup hal-hal yang tidak terkait dengan Lima hal dasar tersebut, namun memiliki nilai signifikan untuk kehidupan manusia, seperti

⁹⁰*Ibid.*, 57-58

ketersediaan sarana-sarana kehidupan. Sementara itu, masalah *tahsiniyat* hal-hal yang signifikansinya dibawah nilai masalah *hajiyyat* dan merupakan aksesoris kehidupan manusia untuk dapat menambah kekayaan melebihi dari kebutuhan dasar.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa setiap tindakan ekonomi, baik produksi maupun distribusi kekayaan alam, harus memenuhi aspek dan fungsi kesejahteraan sosial secara hierarki, yaitu memenuhi kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyat*). Tiga kebutuhan ini merupakan klasifikasi hierarki yang harus diruntut secara proporsional dalam pemenuhannya.

Al-Ghazali memandang bahwa aktivitas ekonomi dalam bentuk pengelolaan sumber-sumber daya alam merupakan kewajiban kolektif dan merupakan pilihan, sementara mendistribusikannya secara merata adalah kewajiban individual. Sebagai kewajiban para pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi adalah melakukan efisiensi dengan tetap memerhatikan tiga target yaitu, mencukupi kebutuhan hidup, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang-orang yang membutuhkan.⁹¹

Al-Ghazali menyatakan fakta dalam kehidupan nyata manusia memiliki perbedaan-perbedaan yang kasat mata, baik dalam sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, keadilan mesti

⁹¹*Ibid.*, 61-63

diatur agar semua orang merasakannya. Bentuk nyata pengaturan tentang keadilan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap setiap kezaliman yang dialami orang-orang tertindas. *Kedua*, mengangkat orang-orang yang memiliki rasa simpatik kepada masyarakat.⁹²

e. Maslahat Sebagai Barometer Keadilan

Konsep mendasar dalam filsafat hukum Islam adalah *maqashid asy syari'ah*, sebuah konsep yang pertama kali dikenalkan oleh syekh al juwaeni. Konsep ini, seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali, menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* dan menolak *mafsadat*.

Diskursus utama *maqashid asy syari'ah* adalah teori maslahat dengan tesis universalnya, setiap penetapan hukum harus bermuara pada maslahat. Setiap aturan hukum harus berorientasi mewujudkan maslahat manusia, baik didunia dan di akhirat.⁹³

Para ahli hukum Islam membuat kategorisasi maslahat dalam dua jenis, yaitu maslahat yang bersifat individual-subjektif (*al maslahah al khashshah*), dan maslahat yang bersifat sosial objektif (*al maslahah al'ammah*). Maslahat yang individual-subjektif (*al maslahah al khashshah*) adalah maslahat yang menyangkut kepentingan seseorang yang bersifat independen dan

⁹²Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam (*Siyasah Maliyah*),.... 63

⁹³Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*,....., 68

terpisah dari kepentingan orang lain. Sedangkan, sosial objektif (*al maslahah al'ammah*) masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kategorisasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya sebuah kaidah populer dikalangan para ahli hukum islam, yang berbunyi: *Almaslahah Al'Ammah muqaddamatun'ala al maslahah al khashshah*. “Kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan perseorangan”.

f. Keadilan Dalam Aktivitas Ekonomi

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam aktivitas ekonomi, baik produksi maupun distribusi. Terdapat beberapa istilah keadilan selain kata *al-'adl*, yang disebutkan oleh Al-Qur'an yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Terminologi dan makna keadilan dalam Al-Qur'an.⁹⁴

Istilah Dalam Al-Qur'an	Pengertian Menurut Islam
<i>'Adl</i>	Persamaan Balasan
	Persamaan Kemanusiaan
	Persamaan Dihadapan Hukum
	Kebenaran, Kejujuran, Proporsional
	Tebusan Dan Penyucian
<i>Qisth</i>	Distribusi Yang Adil
	Berbuat, Bersikap Adil Dan Proporsional
<i>Qasd</i>	Kejujuran Dan Kelurusan
	Kesederhanaan

⁹⁴*Ibid.*, 69

	Hemat
	Keberanian
<i>Qawwam, Istiqomah</i>	Kejujuran Dan
	Kelurusan
<i>Hiss</i>	Distribusi Yang Adil
	Kejelasan, Terang
<i>Mizan</i>	Keseimbangan
	Persamaan Balasan
<i>Wasath</i>	Moderat
	Tengah- Tengah
	Terbaik, Terpilih, Terpuji.

Bila diruntut maknannya kata adil dalam Al-Qur'an mengandung empat pengertian yaitu sebagai berikut:

1) Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.⁹⁵

2) Persamaan Hukum

Persamaan hukum adalah setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum tidak ada alasan apapun yang mendorong diskriminasi seseorang dihadapan hukum. Secara hukum,

⁹⁵Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*.....,70

semua orang diberikan hak yang sama untuk menikmati sumber-sumber kekayaan alam.⁹⁶

3) Moderat

Moderat adalah tidak terlalu memberatkan atau meringankan hukuman bagi siapa saja yang melakukan kerusakan terhadap sumber-sumber kekayaan alam. Hukuman disesuaikan dengan tingkat *mudharat* yang ditimbulkan akibat sesuatu tindakan perusakan.

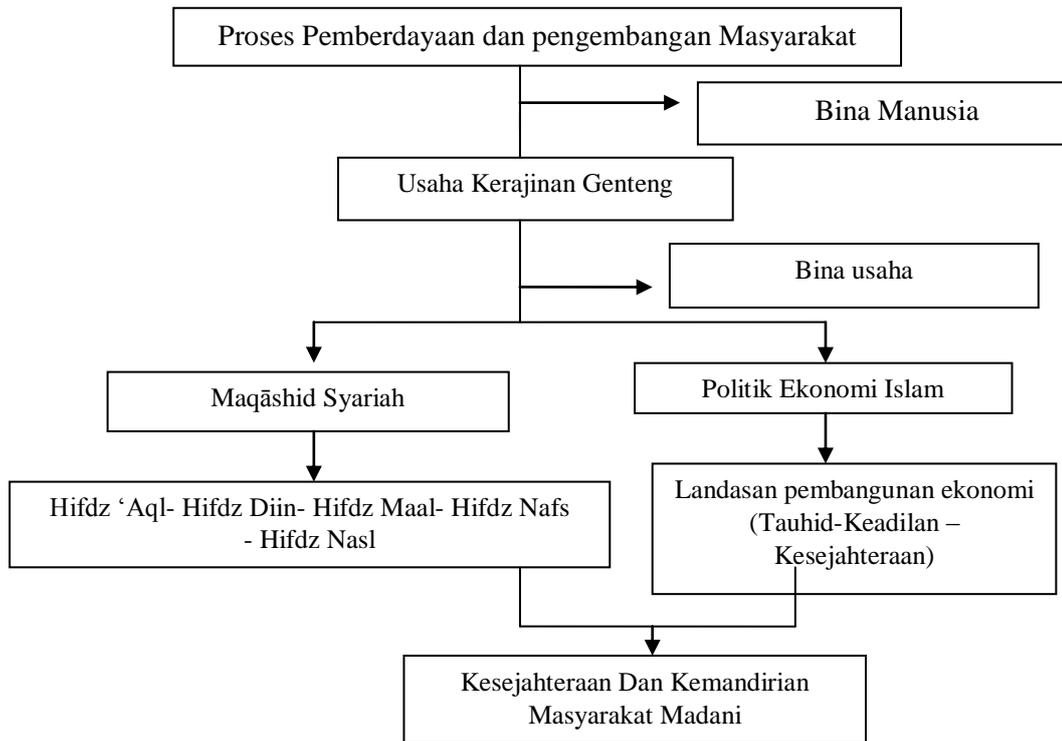
4) Proporsional

Proporsional adalah kesamaan hak yang disesuaikan dengan ukuran setiap individu. Makna Proporsional memberi tiap orang yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁹⁷

⁹⁶*Ibid*,..70

⁹⁷*Ibid*,70

B. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian adalah sistem kinerja yang harus dilaksanakan. Hal ini karena metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Oleh karena itu peneliti harus memiliki dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya.

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,⁹⁸ atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁹⁹

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, dimana jenis kualitatif

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007),. 2

⁹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 3

¹⁰⁰ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992) ,21

merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dan lebih menonjolkan proses sekaligus makna dalam penelitian yang dihasilkan sesuai dengan fakta dilapangan. David William (1995) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.¹⁰¹

Penelitian kualitatif dari sisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata definisi ini hanya mempersoalkan satu metode yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang terpenting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁰²

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya (orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai) sangat beragam. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh

¹⁰¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan Kedua Puluh Dua*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya Offset, 2006.), 5

¹⁰²*Ibid*, 6

pemahaman yang lebih atas masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset *eksploratori*.¹⁰³

Dalam penelitian kualitatif “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Kerajinan Genteng, Prespektif Pada Maqāshid Syariah Dan Politik Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Jawa Timur)“. Ini akan terjadi tiga kemungkinan, yakni masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, yang kedua masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan dan yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga permasalahan harus diganti.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis alat penelitian yakni, Fenomenologi dan etnografi.

- a. Fenomenologi adalah ilmu untuk memahami perilaku manusia terutama dari sudut pandang pelakunya sendiri.¹⁰⁵
- b. Etnografi merupakan suatu pernyataan teoritis tentang orang-orang yang diteliti, etnografi dirancang untuk menjadi bagian dari kumpulan pengetahuan komparatif mengenai hubungan

¹⁰³ Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama,2005) , 46

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabet, 2015) , 285

¹⁰⁵ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta:Lkis, 2008) ,48

masyarakat dan komunikasi pemasaran yang menjadi sumber generalisasi yang lebih luas.¹⁰⁶

2. Jenis penelitian

Berdasarkan pada jenis penelitian yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola penelitian studi kasus. Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.¹⁰⁷ Studi kasus juga dikenal sebagai studi kasus yang bersifat menyeluruh, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer. Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif dan menyeluruh untuk unit sosial yang diteliti.¹⁰⁸ Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kerajinan genteng, prespektif maqāshid syariah dan politik ekonomi islam (studi kasus Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Jawa Timur).

¹⁰⁶ Christine Daymon, Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dan Public Relations Dan Marketing Communication*, (Yogyakarta: Pt Bentang Pustaka, 2008), 205

¹⁰⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 23

¹⁰⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 20

B. Kehadiran Peneliti

Menurut Sugiyono (2011:306), peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Seluruh rangkaian dan proses pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Kehadiran peneliti di lapangan hanyalah bersifat partisipan pasif, peneliti mengadakan pengamatan mendatangi subyek penelitian atau informan dalam hal ini pemberdayaan masyarakat di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yang berbasis kerajinan genteng.

Kemudian peneliti menganalisis data hasil observasi dan wawancara, sekaligus menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan seperti pedoman wawancara, pedoman obeservasi, dan pengambilan gambar. Tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan.

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan pasif. Maka untuk itu peneliti harus bersikap sebaik mungkin, hati-hati dan sungguh-sungguh dalam menjaring data sesuai dengan kenyataan

dilapangan sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini hanyalah bersifat partisipan pasif, dimana peneliti hanya mengambil data dan menganalisis upaya pemberdayaan di Desa Manyaran kaitannya dengan maqashid syariah. Dan hasil observasi serta wawancara tersebut kemudian menganalisis proses pemberdayaan demi wujud potensii daerah.

C. Latar Penelitian

Dikaji dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka karena data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, yakni utamanya dalam sektor industri yang mampu menggerakkan masyarakat sehingga mampu menjadi desa yang berdaya. Sehingga dengan adanya wujud pemberdayaan dngan model pemberdayaan yang berlandaskan pada pengembangan usaha kerajinan genteng ini menjadi suatu hal yang perlu diapresiasi dan ditelaah lebih lanjut, sehingga mampu menjadi pembelajaran bagi akademisi dan para pelaku pemberdayaan ekonomi dimanapun berada.

D. Data Dan Sumber Penelitian

Menurut Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari man data yang diperoleh.¹⁰⁹Data-data tersebut dari dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari non manusia kemudian data dikumpulkan yang berhubungan dengan fokus yang sesuai dengan penelitian. Dalam buku Tanzeh karangan dari Lortfland yang menerangkan. Sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai.¹¹⁰

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer berasal dari wawancara langsung dan daftar pertanyaan (kuesioner). Metode wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berstruktur yang sebelumnya telah dibuat (*interview guide*) untuk dijawab oleh narasumber yang berkompeten. Sedangkan, daftar pertanyaan (kuesioner) berisi pertanyaan yang cukup terperinci dan lengkap. Pada penelitian ini peneliti menggunakan transkrip wawancara, dan transkrip rekaman dalam menuangkan hasil rekaman dalam sebuah tulisan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tretulis dapat dibagi atas sumber buku dan

¹⁰⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 14

¹¹⁰ Ahmad Tanzeh Dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf,2006) , 131

majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹¹¹ Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi, sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.¹¹² Dengan kata lain sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian :

- a) orang (*person*)
- b) tempat (*place*)
- c) sumber data yang berupa catatan (*paper*).

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dari pihak pemerintah desa, serta dari kalangan masyarakat desa setempat. Peneliti mendapatkan data mengenai strategi pengembangan industri dan semua program desa yang membantu perkembangan keterampilan masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti dalam memperoleh data sekunder mendatangi tempat usaha kerajinan genteng untuk menggali informasi dan adapun beberapa hal yang perlu dicatat untuk diijadikan bahan rujukan yang kemudian akan peneliti tambahkan dalam data, kemudian peneliti juga menggali data di balai desa Manyaran untuk mencari informasi yang lebih menyeluruh sebagai salah satu faktor pendukung dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat yang ada dikawasan tersebut.

¹¹¹ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 100

¹¹² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian, Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 21

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.¹¹³

Pengumpulan data merupakan bagian dari perencanaan kegiatan penelitian yang berkenaan dengan proses cara-cara penentuan untuk mendapatkan atau menjangkau data-data penelitian lapangan (terutama data primer) data penelitian lapangan (primer) yang diperoleh dari aktivitas penelitian tentu sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian lapangan yang diperlukan untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹⁴

Oleh karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Sebab menurut peneliti, dengan menggunakan teknik tersebut fenomena yang terjadi dapat dimengerti maksudnya secara baik, jika dilakukan interaksi dengan subyek dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015),308-309

¹¹⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta, Anggota Ikapi,2015) , 117-118

diseimbangkan dengan hasil observasi pada fenomena yang terjadi atau yang sedang menjadi pusat penelitian, selain dari kedua teknik tersebut untuk menguatkan hasil penelitian adalah dengan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara secara mendalam maksudnya adalah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam tentang apa yang menjadi fokus penelitian atau permasalahan. Sehingga, data-data yang diperlukan dapat terkumpul secara sempurna.

1. Observasi langsung (*Direct Observation*) adalah merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.¹¹⁵ Observasi langsung adalah pengambilan data tanpa adanya standar tertentu dapat pula dikatakan bahwa pengambilan data dengan mata tanpa menggunakan alat apapun. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang terenggat untuk berkomunikasi secara verbal.¹¹⁶

Sebagaimana penelitian kualitatif, peneliti sendiri bertindak sekaligus sebagai instrumen pengumpulan data sehingga dengan demikian peneliti dapat menyaksikan secara langsung dan dapat lebih menelaah dan merasakan secara mendalam sebagaimana keadaan yang terjadi di lapangan.

¹¹⁵Mudjiarahardjo.<http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metodepengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> Diakses Pada Tanggal 19 April 2020 Pukul 15.20

¹¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), 91

2. Wawancara Mendalam

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan, wawancara dalam konteks penelitian dapat berarti suatu proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan dengan responden penelitian, baik secara tatap muka atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh)).¹¹⁷ Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari antara lain:

- a) Pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal sebelumnya.
- b) Responden selalu menjawab pertanyaan
- c) Pewawancara selalu bertanya
- d) Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetap harus bersifat netral.

¹¹⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta, Anggota Ikapi, 2015), 121

- e) Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya pertanyaan panduan ini dinamakan *interview guide*.

Dalam wawancara ini terdapat dua belah pihak yang berinteraksi yaitu yang bertanya yang disebut dengan *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (yang diwawancarai atau dalam penelitian disebut dengan responden).¹¹⁸ Dalam memperoleh informasi peneliti melakukan wawancara dengan tidak bebas maksudnya adalah penggunaan wawancara dengan membuat pertanyaan pokok saja sebagai pedoman atau panduan bertanya.¹¹⁹

Wawancara ialah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari penelitian, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri dari laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.¹²⁰

¹¹⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta, Anggota Ikapi, 2015) 121

¹¹⁹ *Ibid*, 122

¹²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 316

Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi-informasi secara *holistic* dan jelas dari informan. Wawancara mendalam ialah temu muka berulang antara subyek peneliti, dalam rangka memahami pandangan subyek peneliti mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.¹²¹

Wawancara mendalam bersifat luwes, terbuka, tidak terstruktur. Intinya ialah pertemuan berulang kali secara langsung antara peneliti dan subyek penelitian. Tujuannya untuk memahami pandangan subyek penelitian tentang kehidupan, pengalaman, atau situasi subyek penelitian, sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Berdasarkan substansinya, wawancara mendalam dibedakan menjadi tiga jenis:

I. Wawancara untuk menggali riwayat hidup sosiologis.

Riwayat hidup menyajikan pandangan orang mengenai kehidupannya dalam bahasanya sendiri. Peneliti berupaya menangkap pengalaman penting dalam kehidupan seseorang menurut definisi orang tersebut.

Wawancara untuk mempelajari kejadian dan kegiatan, yang tidak dapat diamati secara langsung. Orang yang diwawancarai ialah responden atau informan yang

¹²¹ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 133

hidup dilingkungan sosial yang diteliti. Mereka bertindak sebagai “pengamat” bagi peneliti, mata dan telinganya dilapangan. Responden atau informan tidak saja mengungkapkan pandangannya, tetapi juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana orang lain memandang.

Wawancara untuk menghasilkan gambaran luas mengenai sejumlah ajang, situasi atau orang. Wawancara lebih tepat untuk mempelajari sejumlah besar orang dalam waktu relatif singkat dibandingkan pengamatan berpartisipasi.¹²² Dalam penelitian ini peneliti dalam mengolah hasil wawancara yakni dengan menggunakan transkrip rekaman, yang mana wawancara hasil rekaman disalin kedalam bentuk tulisan.

II. Dokumentas

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian (J. Supranto, 1999). Berbagai jenis informasi dapat diperoleh melalui dokumentasi, karena dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Hasil penelitian Observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya ketika ada pendukung oleh

¹²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015),188

sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, disekolah, ditempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung dengan adanya foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.¹²³

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa dokumentasi yakni usaha yang didirikan oleh nasabah dan dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan pegawai koperasi syariah yang kemudian hasilnya akan dilampirkan sebagai penguat dari penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui hasil diskusi bersama aparat desa, wawancara dengan pelaku atau pemilik industri berkaitan secara langsung dengan proses pemberdayaan, dan informasi dari pihak terkait, kemudian menggali data dari kantor Desa Manyaran agar penelitian lebih valid dan data yang diperoleh lebih dapat dipercaya, kemudian mengambil beberapa dokumentasi sebagai penguat dari penelitian.

Namun, dalam pengumpulan data tersebut tidak serta merta berjalan mulus dan hanya dilakukan beberapa hari saja, melainkan dilakukan selama kurang lebih dua bulan dan dalam mengambil informasi terdapat banyak informasi yang setengah-setengah dalam artian narasumber memberikan informasi dengan tidak menyeluruh, alhasil peneliti harus mengulang lagi wawancara dengan nasabah

¹²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitataif..* 82-83

diwilayah lain, Sampai pada akhirnya data dapat terkumpul menjadi satu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan baik temuan substantif atau formal, dapat juga diartikan bahwa analisis data merupakan pencarian atau pelacakan pola-pola dari pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, antar kajian dan hubungannya terhadap keseluruhan.¹²⁴

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus, dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan banyaknya variasi, sehingga dalam analisis datanya masih bersifat sementara karena datanya yang belum sepenuhnya memenuhi pola kejelasan. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data.

Yang di maksud dengan analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data, menjabarkannya dan memilahnya mana yang perlu ditambahkan dalam penelitian dan mana yang hanya perlu untuk dipelajari saja.

¹²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Kasara, 2015), 209-210

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Jadi, selama penelitian di lapangan peneliti menggunakan metode analisis studi kasus. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan, dan mencatat hasil wawancara yang dilakukan. Setelah itu fokus peneliti terhadap obyek yang dijadikan penelitian, kemudian menganalisis hasil wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Analisis teknik deskriptif-kualitatif yakni teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan dari data-data yang telah terkumpul diawal seperti data hasil wawancara dengan diskusi bersama aparat desa, wawancara dengan pelaku atau pemilik kerajinan genteng berkaitan secara langsung dengan proses pemberdayaan dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran secara umum dan secara menyeluruh tentang keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat dilakukanya penelitian.

Analisis data penulisan ini peneliti menggunakan analisis data induktif yaitu proses menganalisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum, sehingga dalam urutannya peneliti mereduksi data, kemudian menyajikan data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan data hasil dari penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Ada beberapa dalam teknik pengecekan keabsahan data, yaitu *kredibilitas*, *transferabilitas*, *auditabilitas* (*dipendabilitas*), dan *konfirmabilitas*. Berbagai teknik ini dapat dipilih salah satu atau lebih untuk mencapai keabsahan data. Oleh karena itu, peneliti harus menampilkan kejujuran. Manipulasi data akan mengakibatkan keabsahan data kurang keilmiahannya.¹²⁵

i. Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu:

- a) Memperpanjang cara observasi, agar cukup waktu untuk menegnal responden, lingkungannya dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hal ini juga sekaligus untuk mengecek informasi, agar dapat diterima sebagai orang dalam.
- b) Pengamatan terus menerus, agar penelitian dapat melihat sesuatu secara cermat, terinci dan mendalam, sehingga dapat membedakan mana yang bermakna dan mana yang kurang bermakna.
- c) Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik, dan sumber data yang telah diperoleh. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang

¹²⁵ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 111-112

sama. Sedangkan, triangulasi sumber berarti peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

d) Member-check artinya mengulang setiap akhir wawancara, agar diperiksa subyek, atau terkadang peneliti membutuhkan saran dan kritik dari teman sejawat.

e) *Per debriefing* dengan cara membicarakan masalah penelitian dengan orang lain, tanya jawab pada teman sejawat, tentunya harus cari orang-orang yang respek.

ii. *Transferabilitas*, yaitu merupakan validitas eksternal berupa keteralihan. Yakni, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disejajarkan pada kasus daerah lain. kemiripan antar subyek dan data penelitian merupakan indikator adanya kemungkinan transferabilitas. Berarti di antara dua budaya atau lebih memiliki persamaan tertentu.¹²⁶

iii. *Konfirmabilitas* hampir sama dengan *dependabilitas* yaitu menguji hasil proses penelitian. Sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersama, menguji konfirmabilit berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang

¹²⁶ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widayatama, 2006), 112

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabiliti.¹²⁷

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.

Peneliti menggabungkan semua hasil penelitian, baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan kata lain, triangulasi merupakan menguji keabsahan dari hasil penelitian dengan peneliti, metode, teori, dan sumber data. Jika sudah dipastikan triangulasi memiliki hasil yang sama dari awal hingga akhir, maka data yang diperoleh dianggap kredibel. Perpanjangan masa pengamatan, berarti peneliti berada dilapangan yaitu Kerajinan Genteng di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.¹²⁸ Penelitian akan memperpanjang masa pengamatan untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali dua kali, akan tetapi peneliti mungkin sering datang untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya.

Keterpercayaan (*Creadibility*) Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas adalah: teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan

¹²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009), 277

¹²⁸ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), 329

kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecukupan referensi. Keterpercayaan penelitian kualitatif tidak terletak pada derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai tetapi pada kredibilitas peneliti.¹²⁹ Pada kredibilitas data ini peneliti setelah mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh kemudian berdiskusi dengan beberapa orang yang lebih mengetahui dari berbagai aspek penelitian untuk mendapatkan keabsahan informasi sebagai tambahan referensi dalam hasil penelitian.

H. Tahap- Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan tahap-tahap penelitian menurut Lexy J. Moleong¹³⁰, tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pra-lapangan

Adapun beberapa hal yang perlu dianalisis dalam penelitian sebelum terjun di lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.¹³¹

¹²⁹ Djam'an Satori, Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 164

¹³⁰ Anonim, Tanpa Judul, <http://digilib.uinsby.ac.id/5601/6/bab3.pdf>, Diakses Pada 26 April 2020 Pukul 21.00 Wib.

¹³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 245

Dalam penelitian ini peneliti mempersiapkan beberapa bahan yang akan akan digali, termasuk mendata jumlah industri genteng di desa Manyaran, termasuk menyiapkan alat tulis, kamera sebagai alat untuk mengambil dokumentasi kemudian menentukan wilayah nasabah yang tepat untuk dijadikan tempat penelitian.

2. Tahap Lapangan

Setelah tahap pralapangan terlampaui, maka tahap yang selanjutnya adalah: (i) memahami latar penelitian dan persiapan diri untuk memasuki tahap pekerjaan lapangan; (ii) memasuki lapangan; dan (iii) berperan serta sambil mengumpulkan data. Pada proses peneitian dilapangan tersebut peneliti berusaha untuk berbaur bersama dengan masyarakat setelah mendatangi salah satu dari empat wilayah yang telah ditentukan, kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan, setelah proses berjalan dengan baik peneliti kemudian menggali informasi dan data dari masyarakat (kerajinan genteng) dengan teknik yang sudah dijelaskan pada pemaparan diatas.

3. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini analisis data dalam penelitian kualitaitaif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel.¹³²

I. Tahap penelitian

Tahap penelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokok peneliti sebagai alat penelitian, menjadi berbeda dengan tahap penelitian non kualitatif. Adapun Tahap penelitian ini meliputi:

1. Tahap sebelum lapangan, ada beberapa langkah pada tahap ini, yaitu:
 - a. Penyusunan proposal
 - b. Menentukan fokus penelitian
 - c. Menentukan lapangan penelitian
 - d. Mengurus perizinan
 - e. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap bekerja lapangan
 - a. Memasuki lapangan
 - b. Berperan serta mengumpulkan data
 - c. Pencatatan data
3. Tahap analisa data

¹³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 245

- a. Pengorganisasian data
 - b. Pemilihan data
 - c. Pengecekan keabsahan data
4. Tahap penulisan laporan
- a. Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian tesis
 - e. Perbaikan setelah ujian tesis